

SI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

SKRIPSI

ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA SEBAGAI DASAR
PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Diajukan Oleh:

DESI DWI HARTINI
NIM. 01033130038

0-7
1/1

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2007

S
352.1207
Har
a
2007

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA



SKRIPSI

**ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA SEBAGAI DASAR
PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



Diajukan Oleh:

DESI DWI HARTINI
NIM. 01033130038

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2007

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DESI DWI HARTINI
NIM : 01033130038
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA
SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN
BERBASIS KINERJA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN

Tanggal

21/7/07

Ketua:

DOSEN PEMBIMBING


Drs. Burhanuddin, M.Acc, AK

Tanggal

18 Juni 2007

Anggota:


Sulaiman S. M., SE, MBA, AK

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

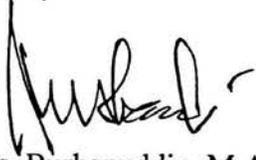
TANDA PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : DESI DWI HARTINI
NIM : 01033130038
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA
SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN
BERBASIS KINERJA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Telah diuji di depan panitia ujian komprehensif pada tanggal 8 Agustus 2006 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 9 Agustus 2006

Ketua,



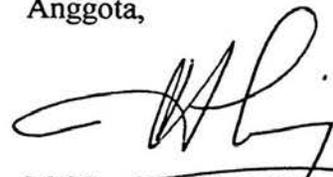
Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak
NIP. 131801649

Anggota,



Sulaiman S.M.,SE, MBA, Ak
NIP. 132000094

Anggota,



M. Nasal, SE, MAFIS, Ak
NIP.132000096

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dra. Hj. Rina Tjandrakirana DP, MM, Ak
NIP. 132000097

MOTTO:

"Lebih baik diasingkan daripada berpihak pada kemunafikan"

Kupersembahkan kepada:

☉ Ayah dan Ibu tercinta

☉ Ayuk Hera, Wawan, dan Mifta penyemangat setia

☉ Almamaterku, Akuntansi FE Unsri Indralaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T., karena atas izin-Nya jualah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini mengambil judul **Analisis Penyusunan Rencana Kerja Sebagai Dasar Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin**. Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab III Gambaran Umum Kabupaten Musi Banyuasin, Bab IV Analisis Data, dan Bab V Kesimpulan dan Saran.

Data utama yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Banyuasin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk tahun anggaran 2004 dan 2005, Kabupaten Musi Banyuasin belumlah menerapkan anggaran Berbasis Kinerja sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya indikator kinerja yang jelas yang seharusnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Penulis berharap kiranya skripsi ni dapat memberikan kontribusi bagi penyusunan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Mus Banyuasin di masa mendatang. Selain itu, juga penulis juga berharap skripsi ini dapat menjadi bahan masukan akademisi bagi penelitian akuntansi sektor publik.

Penulis

Desi Dwi Hartini

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penyusunan Rncana Kerja Sebagai Dasar Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin” sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun material dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah S.W.T., terima kasih atas inspirasi dan berbagai kelancaran yang diberikan padaku selama penulisan skripsi ini.
2. Ayah dan Ibuku tercinta, terima kasih atas semua dukungan yang diberikan termasuk pengertiannya atas keterlambatan penyelesaian skripsi ini. Semoga pencapaian desi ini bisa menjadi kado yang diinginkan buat ulang tahun pernikahan perak Ayah-Ibu.
3. Bapak Prof.Dr.Ir.H. Zainal Ridho Djafar, Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Syamsurijal AK, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dra. Hj. Rina Tjandrakirana DP, MM, Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unversitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak, Ketua Pembimbing Skripsi, terima kasih Pak atas semua bimbingan dan bantuan yang sudah diberikan pada penulis, juga tak lupa penulis minta maaf apabila banyak berbuat kesalahan selama pengerjaan skripsi.
7. Bapak Sulaiman SM, SE, MBA, Ak, Anggota Pembimbing Skripsi, terima kasih Pak atas semua bimbingan dan bantuan yang sudah diberikan pada penulis, juga tak lupa penulis minta maaf apabila banyak berbuat kesalahan selama pengerjaan skripsi.
8. Bapak Muhammad Nasai, SE, MAFIS, Ak, Anggota Panitia Ujian Komprehensif, terima kasih atas kesediaan Bapak menguji penulis dan penulis juga minta maaf bila selama ujian berlangsung berbuat kesalahan.

9. Ibu Emylia Yuniartie, SE, MSi, Ak, Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan yang Ibu berikan selama 4 tahun ini, penulis minta maaf bila pernah melakukan kesalahan.
10. Semua Bapak/Ibu dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi, terutama dosen Jurusan Akuntansi, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Penulis juga meminta maaf bila selama proses perkuliahan penulis banyak berbuat salah.
11. Semua Pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, terutama Pak Tuter, Yuk AI, dan Kak Heru.
12. Pimpinan dan staf karyawan Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin, terutama Biro Perencanaan dan Penyusunan Anggaran serta Bagian Tata Usaha.
13. Ayukku, Hera belewah (teteup) tercinta, yang telah memberikan “cambukan-cambukan” semangat buat adiknya.
14. Adik-adikku tersayang, Wawan si wak black dan Mifta si cerewet, yang telah banyak memberikan *shock therapy* sehingga selama pengerjaan skripsi ayukmu ini bisa tetap SEMANGAT!
15. Sahabat-sahabat baikku selama 4 tahun ini Ceper Kedat (kan sekarang lah SE jadi selanjutnya fokuskan pada perhatianmu untuk pelangsingan dan pertumbuhan tubuh y Per! Supayo biso dapet iaki cepet2!), Boem si Ratu Buaya (jangan nemen igo begaul samo buayo gek susah ngerubah sifat Kepatianmu trus jadinya susah dapet jodoh!), Squidcul Markonah (ayuk sikok ini walaupun paling kacau tapi la duluan sukses di Conoco, doain y Cul biar kami biso nyusul), O..na..na.. (kabarnya la nak nyusul cul y? Gek kalo la disano jangan lupoke kami samo pered y!), Desbond (jangan kelamoan ngebonding rambut, des! Kami jadi kelamoan nunggu trakterannyo), Sus_Pat no.7 (kapan undangannyo samo bang noya jadi? Ternyata sekian bulan nyandang gelar SE dak biso ngerubah Kepatianmu y Pi?), Aan lemot (jangan cak-cak lemot kalo lagi jatah nrakter y an!). Biar la dak samo-samo kuliah lagi kito tetep sering-sering mabok-mabokan bareng lagi y.
16. Mama Lena tersayang, terima kasih atas kesediaannya mau menampung dan memberi makan kami kalo lagi nak gawein tugas atau nak mabok-mabokan.

17. Teman seperjuanganku, Ana dan Epan, terima kasih atas semua bantuan yang sudah kalian berikan.
18. Teman-teman angkatan 2003 di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, terima kasih atas kebersamaannya yang menyenangkan.
19. Kakak-kakakku angkatan 2001 dan 2002 serta adik-adik angkatan 2004, terima kasih atas bantuan yang diberikan pada penulis selama proses perkuliahan.

Semoga Allah S.W.T. membalas budi baiknya dan berkah kepada kita semua, Amin.

Penulis,
Desi Dwi Hartini

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| UCAPAN TERIMA KASIH | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.3.2 Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.4 Metode Penelitian | 6 |
| 1.4.1 Ruang Lingkup Penelitian | 6 |
| 1.4.2 Teknik Pengumpulan Data | 7 |
| 1.4.3 Teknik Analisa | 7 |
| 1.5 Sistematika Pembahasan | 8 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| 2.1 Konsep Anggaran Sektor Publik | 10 |
| 2.1.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik | 10 |
| 2.1.2 Pentingnya Anggaran Sektor Publik | 11 |
| 2.1.3 Fungsi Anggaran Sektor Publik | 12 |
| 2.1.4 Karakteristik Anggaran Sektor Publik | 15 |
| 2.1.5 Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik | 16 |
| 2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah | 18 |
| 2.2.1 Pengertian Keuangan Daerah | 18 |
| 2.2.2 Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah | 19 |
| 2.2.3 Subyek Pengelolaan Keuangan Daerah | 21 |
| 2.2.4 Prinsip-prinsip Penyusunan dan Pelaksanaan APBD | 21 |
| 2.2.5 Proses Penyusunan APBD | 24 |
| 2.2.6 Proses Penetapan APBD | 26 |
| 2.2.7 Struktur APBD | 28 |
| 2.2.8 Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah | 33 |
| 2.3 Anggaran Berbasis Kinerja | 36 |
| 2.3.1 Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja | 36 |
| 2.3.2 Keunggulan dan Kelemahan Anggaran Berbasis Kinerja | 37 |
| 2.3.3 Dasar Hukum Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja | 38 |
| 2.3.4 Prinsip-prinsip Penganggaran | 39 |
| 2.3.5 Aktivitas Utama dalam Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja | 40 |
| 2.3.6 Tahap-tahap Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja | 40 |
| 2.3.7 Siklus Penyusunan Anggaran Daerah | 44 |

BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

| | |
|---|----|
| 3.1 Gambaran Umum Kabupaten Musi Banyuasin | 50 |
| 3.1.1 Gambaran Umum Wilayah | 50 |
| 3.1.2 Luas Wilayah | 51 |
| 3.1.3 Keadaan Alam (Iklim) | 52 |
| 3.2 Struktur Organisasi | 53 |
| 3.3 Visi, Misi, dan Rencana Strategis Kabupaten Musi Banyuasin | 56 |
| 3.3.1 Visi | 56 |
| 3.3.2 Misi | 56 |
| 3.3.3 Rencana Strategis | 57 |
| 3.4 Kondisi Keuangan pada APBD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin | 59 |

BAB IV ANALISIS DATA

| | |
|--|----|
| 4.1 Analisis Strategi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Visi dan Misi) | 62 |
| 4.1.1 Penetapan Visi | 63 |
| 4.1.2 Penetapan Misi | 64 |
| 4.2 Analisis Tujuan Strategis Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin | 68 |
| 4.3 Penetapan Program (Aktivitas) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2004 dan 2005 | 72 |
| 4.3.1 Program (Aktivitas) yang Dilakukan Untuk Mendukung Rencana Strategis yang Pertama | 74 |
| 4.3.2 Program (Aktivitas) yang Dilakukan Untuk Mendukung Rencana Strategis yang Kedua | 78 |
| 4.3.3 Program (Aktivitas) yang Dilakukan Untuk Mendukung Rencana Strategis yang Ketiga | 80 |
| 4.3.4 Program (Aktivitas) yang Dilakukan Untuk Mendukung Rencana Strategis yang Keempat | 83 |
| 4.3.5 Program (Aktivitas) yang Dilakukan Untuk Mendukung Rencana Strategis yang Kelima | 86 |
| 4.3.6 Program (Aktivitas) yang Dilakukan Untuk Mendukung Rencana Strategis yang Keenam | 88 |
| 4.4 Evaluasi dan Pengambilan Keputusan | 91 |
| 4.4.1 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) | 91 |
| 4.4.2 Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) | 93 |
| 4.4.3 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran | 94 |
| 4.4.4 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) | 96 |
| 4.4.5 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) APBD | 97 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|----------------------|-----|
| 5.1 Kesimpulan | 101 |
| 5.2 Saran | 103 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA | 104 |
|-----------------------------|------------|

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 2.1 | Subyek Pengelolaan Keuangan Daerah | 21 |
| Tabel 3.1 | Luas Daerah, Jumlah Desa/Kelurahan, dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin | 51 |
| Tabel 3.2 | Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2004 | 60 |
| Tabel 3.3 | Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2005 | 61 |
| Tabel 4.1 | Rincian Alokasi Dana Program Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (Profesi) Tahun Anggaran 2004 | 75 |
| Tabel 4.2 | Rincian Alokasi Dana Program Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (Profesi) Tahun Anggaran 2005 | 75 |
| Tabel 4.2 | Rincian Bantuan Keuangan pada Parpol Tahun Anggaran 2004 | 76 |
| Tabel 4.3 | Rincian Bantuan Keuangan pada Parpol Tahun Anggaran 2005 | 77 |
| Tabel 4.4 | Rincian Alokasi Dana Perekrutan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2004 | 77 |
| Tabel 4.5 | Rincian Dana Alokasi Program E-Government Tahun Anggaran 2004 dan 2005 | 79 |
| Tabel 4.6 | Rincian Dana Alokasi Biaya Tenaga Ahli Konsultan Tahun Anggaran 2004 | 80 |
| Tabel 4.7 | Aktivitas Pembangunan Infrastruktur Tahun Anggaran 2004 | 81 |
| Tabel 4.8 | Aktivitas Pembangunan Infrastruktur Tahun Anggaran 2005 | 81 |
| Tabel 4.9 | Rincian Dana Alokasi Peningkatan Potensi Daerah Tahun Anggaran 2004 dan 2005 | 82 |
| Tabel 4.10 | Alokasi APBD Musi Banyuasin untuk Sektor Pendidikan | 81 |
| Tabel 4.11 | Rincian Dana Alokasi Program Pendidikan Tahun Anggaran 2004 dan 2005 | 84 |
| Tabel 4.12 | Daftar Aktivitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang PON XVI 2004 | 85 |
| Tabel 4.13 | Rincian Dana Alokasi Program Penataan Ruang Tahun Anggaran 2004 dan 2005 | 88 |
| Tabel 4.14 | Potensi Pertambangan dan Migas Kabupaten Musi Banyuasin | 90 |
| Tabel 4.15 | Rincian Dana Alokasi Program Perkebunan dan Pertanian Tahun Anggaran 2004 dan 2005 | 90 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Proses Penyusunan Rancangan APBD | 44 |
| Gambar 2.2 Penyusunan KUA dan PPA | 47 |
| Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kabupaten Musi Banyuasin | 54 |

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI BAB I

NAMA : DESI DWI HARTINI
NIM : 01033130038
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA
SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN
BERBASIS KINERJA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN

Tanggal

12/1/07

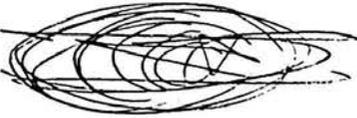
Tanggal 10 Maret 2007

DOSEN PEMBIMBING

Ketua:


Drs. Burhanuddin, M.Acc, AK

Anggota:


Sulaiman S. M., SE, MBA, AK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam upaya untuk memantapkan kemandirian Pemerintah Daerah yang dinamis dan bertanggungjawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah. Pengelolaan sumber daya daerah harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga otonomi yang diberikan kepada daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah sangat membutuhkan aparat daerah yang berkualitas tinggi, bervisi strategik, serta memiliki moral yang baik sehingga dapat mengelola pembangunan daerah dengan baik melalui lembaga-lembaga sektor publik. Lembaga sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif terhadap aktivitas yang dilakukan. Tuntutan tersebut menyebabkan terjadinya reformasi sektor publik yang berujung pada berbagai perubahan yang terjadi pada lembaga sektor publik. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menjawab tuntutan yang diarahkan kepada sektor publik.

Lembaga sektor publik sendiri dalam pelaksanaannya dituntut untuk mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi pembangunan daerah. Satu hal yang harus dikelola dengan baik dan harus dapat

dipertanggungjawabkan adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah merupakan gabungan dari berbagai anggaran dari pemerintah kota/kabupaten dan lembaga-lembaga sektor publik, dalam hal ini dinas atau instansi terkait, yang membantu terlaksananya pembangunan di daerah.

Anggaran daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi belanja di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kinerja (Mardiasmo:2002).

Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi (Mardiasmo:2002). Hal tersebut terutama tercermin dari komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan terhadap penerimaan dan belanja harus dilakukan secara cermat dan sistematis.

Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran publik berkembang dan

berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Kedua pendekatan tersebut adalah: anggaran tradisional (konvensional) dan pendekatan *New Public Management* (Mardiasmo:2002).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penganggaran. Perubahan-perubahan itu didorong oleh berbagai faktor, termasuk diantaranya perubahan yang begitu cepat di bidang politik, desentralisasi, dan berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah. Berbagai perubahan ini membutuhkan dukungan sistem penganggaran yang lebih responsif, yang lebih dapat memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan masyarakat atas peningkatan kinerja pemerintah dalam bidang pembangunan, kualitas layanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Sistem penganggaran yang selama ini diterapkan di Indonesia, yaitu sistem anggaran tradisional (*incrementalism* dan *line-item*) yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan dunia internasional yang sangat pesat, sehingga sudah selayaknya diganti dengan sistem penganggaran yang mampu merespon perubahan-perubahan tersebut. Sebagai gantinya adalah Anggaran Negara Berdasarkan Prestasi Kerja atau istilah yang lebih sering digunakan adalah Anggaran Berbasis Kinerja.

Menurut Mardiasmo (2002:84), sistem penganggaran berbasis kinerja yang kini mulai marak dipraktikkan, secara konseptual dan praktikal masih menyisakan masalah. Secara konseptual, sesungguhnya, sistem penganggaran berbasis kinerja

ini lebih dimaksudkan untuk sektor privat atau sektor non-pemerintahan, karena berbagai alasan. Pertama, produk sektor pemerintahan kebanyakan bukanlah sesuatu yang mudah diukur, dan kalau pun bias, maka ukuran itu hanyalah ukuran yang dijustifikasi semata. Kedua, terkait dengan itu, kompetensi sumber daya manusia diyakini masih menjadi masalah besar. Secara praktik, berbagai kebutuhan dasar untuk mendukung terlaksananya anggaran berbasis kinerja masih belum rampung.

Dengan keterbatasan yang ada saat ini, banyak orang beranggapan bahwa anggaran berbasis kinerja masih belum terlalu merubah keadaan yang ada. Dengan kata lain, konsep anggaran terdahulu, yaitu anggaran tradisional, masih menempel pada konsep anggaran berbasis kinerja ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, skripsi ini diberi judul **Analisis Penyusunan Rencana Kerja Sebagai Dasar Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin** dengan mengambil objek penelitian di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Sejalan dengan terjadinya otonomi daerah dan perubahan yang terus menerus menuju keinginan mewujudkan *Good Corporate Governance*, tidak hanya Pemerintah Pusat yang dituntut untuk berubah menuju ke arah yang lebih baik, tetapi Pemerintah Daerah juga harus ikut serta dalam mewujudkan keinginan tersebut. Sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat membantu pelaksanaan hal tersebut menjadi lebih cepat. Untuk membantu tercapainya keinginan tersebut, Pemerintah Daerah sebagai faktor pendukung

dituntut untuk mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi pembangunan di daerah mereka masing-masing.

Salah satu aspek yang paling mendasar dari pemerintahan daerah adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Anggaran daerah di setiap Pemerintah Daerah biasanya terdiri dari dinas-dinas dan instansi-instansi terkait yang mendukung terlaksananya pembangunan di daerah tersebut. Dinas-dinas dan instansi-instansi terkait tersebut juga menyusun anggaran tahunan yang juga akan dilaporkan ke Pemerintah Daerah masing-masing.

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang termasuk Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam anggaran tradisional adalah *incrementalism* dan *line-item*. Konsep ekonomi, efisiensi, dan efektivitas seringkali tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Akibatnya pada akhir tahun anggaran seringkali terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian dipaksakan pada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak penting untuk dilaksanakan.

Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era *New Public Management* telah mendorong upaya pemerintah untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran negara. Pendekatan yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun anggaran adalah pendekatan kinerja. Sebagai konsekuensi adanya perubahan-perubahan mendasar dari sistem penganggaran tradisional menjadi sistem penganggaran berbasis kinerja, dalam aplikasinya akan timbul permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dihindari.

Berdasarkan wacana di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi penyusunan rencana kerja sebagai dasar penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengenal secara baik implementasi penyusunan rencana kerja sebagai dasar penyusunan anggaran berbasis kinerja pada APBD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari analisis penyusunan rencana kerja sebagai dasar penyusunan anggaran berbasis kinerja pada APBD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam:

1. Menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan atau program atau kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Melihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan.
3. Menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

1.4 METODE PENELITIAN

1.4.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi hanya pada analisis implementasi penyusunan rencana kerja sebagai dasar penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2004 dan 2005.

1.4.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Mudrajad Kuncoro (2003:17), data sekunder merupakan bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) baik yang dipublikasikan maupun tidak. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah:

1. Sejarah singkat Kabupaten Musi Banyuasin
2. Gambaran umum wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
3. Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2004 dan 2005

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu melalui penyelidikan sumber dokumen yang dibutuhkan. Data yang digunakan diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Banyuasin.

1.4.3 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif, yakni menganalisis data dan informasi yang ada di objek penelitian. Kemudian data yang ada tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan menuju suatu kesimpulan.

1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam sistematika pembahasan ini, akan diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, dalam bab-bab yang ada secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan tentang landasan teori, yaitu Anggaran Berbasis Kinerja dan Anggaran Tradisional secara keseluruhan, seperti pengertian Anggaran Berbasis Kinerja dan Anggaran Tradisional, Perkembangan Konsep Anggaran di sektor publik, dasar hukum penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja, serta proses penyusunannya.

BAB III : GAMBARAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Bab ini akan menguraikan secara singkat sejarah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin serta aktivitas-aktivitasnya.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan (analisis) terhadap permasalahan yang telah diajukan tentang implementasi penyusunan rencana kerja sebagai dasar penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini penulis akan menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran yang mungkin berguna bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di masa yang akan datang.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI BAB II

NAMA : DESI DWI HARTINI
NIM : 01033130038
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA
SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN
BERBASIS KINERJA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

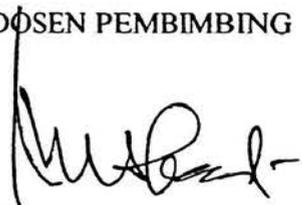
TANGGAL PERSETUJUAN

Tanggal



Ketua:

DOSEN PEMBIMBING



Drs. Burhanuddin, M.Acc, AK

Tanggal 10 Juni 2007

Anggota:



Sulaiman S. M., SE, MBA, AK

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2004. *Buku Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004*. Sekayu: Kabupaten Musi Banyuasin.
- _____. 2005. *Buku Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2005*. Sekayu: Kabupaten Musi Banyuasin.
- _____. 2007. MUBA Menjawab Pesimisme Warga Miskin Atas Pendidikan 20 Maret 2007. Diambil pada tanggal 24 Maret 2007 dari <http://www.muba.go.id//>.
- _____. 2006. Kabupaten Musi Banyuasin. Diambil pada tanggal 27 Desember 2006 dari <http://www.muba.go.id//>.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2006. Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran 2005/Semester II Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dan 2005 Pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Instansi Terkait di Sekayu 11 Januari 2006. Diambil pada tanggal 24 Maret 2007 dari <http://www.bpk.go.id//>.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Jogjakarta: BPF-UGM.
- Deputi IV BPKP. 2005. Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi) Mei-2005. Diambil pada tanggal 27 Desember 2006 dari <http://www.bpkp.go.id//>.
- Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. 2007. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi UNSRI*. Indralaya: FE-UNSRI.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jogjakarta: Penerbit Andi.
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Jogjakarta: BPF-UII.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Diambil pada tanggal 27 Desember 2006 dari <http://Indonesia.go.id//>.